

Kegagalan Kemerdekaan New Caledonia Dari Prancis: Studi Kasus Perjuangan Suku Kanak

Ridwan Azhari Akbar¹, Muhamad Adian Firdaus², Rahmi Fitriyanti³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ridwanazhari345@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the causes of the Kanak people's failed struggle in the New Caledonia independence referendum in 2018, 2020, and 2021. The Kanak people are an indigenous people who inhabited New Caledonia before the arrival of the French in 1853. The Kanak people have fought for their independence through referendums stipulated in the 1998 Noumea Agreement. This agreement provides for three referendums, but all referendums failed to make New Caledonia independent. Thus, the third referendum in 2021 marks the end of the Kanak people's struggle for independence, they are legally integrated into the French Republic as a final decision. This study uses the conceptual framework of "referendum" to determine the fate of independence, and "integration" as a colonial strategy aimed at maintaining control over its colonies. The research method used is qualitative which is descriptive analytical, an inductive approach, using primary and secondary sources, and library research data collection techniques. This study found that the causes of the referendum failure were a combination of political strategies, demographic imbalances between the Kanak people and immigrants, and a voting system that did not benefit the Kanak people. The dynamics of voting rights are also very significant in providing advantages for immigrants who can vote in a referendum that should be a referendum on the fate of the Kanak tribe. This study highlights that the referendum, which should be a democratic instrument, is used as a political tool to maintain decolonization in a modern form that is actually aimed at maintaining the colonial power. In the case of New Caledonia, the referendum has become a means to integrate the region into the French Republic, and sacrifice the right to self-determination of independence which should be the main focus of the decolonization process in the Non-Self Governing Territories (NSGT).

Keywords: Referendum, Kanak tribe, New Caledonia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab perjuangan suku Kanak yang gagal dalam referendum kemerdekaan New Caledonia pada 2018, 2020, dan 2021. Suku Kanak adalah suku asli yang menghuni New Caledonia sebelum kedatangan Prancis pada 1853. Suku Kanak telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya melalui referendum yang diatur dalam Perjanjian Noumea 1998. Perjanjian ini memberikan kesempatan tiga kali referendum, tetapi semua referendum gagal untuk membuat New Caledonia merdeka. Dengan demikian, referendum ketiga tahun 2021 menandai akhir perjuangan kemerdekaan suku Kanak, mereka secara sah terintegrasi ke dalam Republik Prancis sebagai keputusan yang final. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual "referendum" untuk menentukan nasib kemerdekaan, dan "integrasi" sebagai strategi kolonial yang bertujuan mempertahankan kendali atas wilayah jajahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, pendekatan induktif, menggunakan sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan data studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab kegagalan referendum adalah kombinasi strategi politik, ketidakseimbangan demografi suku Kanak dengan warga pendatang, dan sistem pemilih yang tidak menguntungkan suku Kanak. Dinamika

hak pilih juga sangat signifikan dalam memberikan keunggulan bagi warga pendatang yang bisa memilih pada referendum yang seharusnya menjadi referendum penentuan nasib suku Kanak. Penelitian ini menyoroti bahwa referendum yang seharusnya menjadi instrumen demokratis, tetapi digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan dekolonialisasi dalam bentuk modern yang justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kolonial. Dalam kasus New Caledonia, referendum telah menjadi sarana untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Republik Prancis, dan mengorbankan hak penentuan nasib kemerdekaan yang seharusnya menjadi fokus utama dari proses dekolonialisasi di wilayah Non-Self Governing Territories (NSGT).

Kata Kunci : referendum, suku kanak, new caledonia

PENDAHULUAN

New Caledonia adalah wilayah seberang laut Republik Prancis dengan otonomi khusus sejak tahun 1998. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan wilayah ini ke dalam 17 daftar *Non-Self Governing Territories* (NSGT), atau wilayah-wilayah yang belum mengurus pemerintahannya sendiri, sebagaimana Bab XI Piagam PBB Pasal 73-74 (United Nations, n.d.). New Caledonia terletak di kawasan Oseania. Wilayah ini memiliki luas 18.575 km², dan berjarak ± 17.000 km dari Prancis Metropolitan di Eropa Barat. Pada awalnya wilayah ini ditemukan oleh penjelajah asal Inggris, James Cook, pada 4 September 1774 (BBC n.d.; Gouvernement De La Nouvelle-Calédonie, n.d.).

Sejarah kolonialisasi Prancis dimulai pada 24 September 1853, di bawah kepemimpinan Napoleon III. Dalam Preamble Perjanjian Noumea 1998, secara eksplisit tertulis bahwa Prancis mengklaim wilayah ini milik mereka dengan alasan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang kosong (Gouvernement De La Nouvelle-Calédonie, 1998). Klaim ini didasarkan pada kondisi hukum internasional yang diakui oleh negara-negara Eropa dan Amerika kala itu. Namun, sebenarnya wilayah ini bukanlah wilayah yang kosong, karena ada entitas suku, yaitu suku Kanak yang telah menghuni New Caledonia sebelumnya (Gouvernement De La Nouvelle-Calédonie, 1998).

Kolonialisasi Prancis tidak hanya didasarkan pada klaim kekuasaan, tetapi juga ada kepentingan ekonomi, khususnya eksplorasi sumber daya alam (SDA). New Caledonia adalah wilayah yang kecil, akan tetapi sangat kaya dengan cadangan nikel yang menyumbang sekitar 30–40% dari cadangan nikel dunia, dan menjadi penghasil nikel keempat terbesar di dunia (Fisher, 2013).

Selain potensi SDA, letak posisi geografinya juga sangat terbilang strategis. New Caledonia pernah menjadi basis militer yang sangat penting bagi Prancis, dan sekutunya selama masa Perang Dunia II (PD II). Lalu, juga sempat digunakan sebagai penjara bagi para tahanan politik (Burhanuddin, 2015).

Penemuan awal potensi nikel ditemukan oleh pemerintah kolonial Prancis setelah dua dekade kedatangannya. Pada tahun 1874, potensi nikel ditemukan di pulau utama Grande Terre. Pabrik pengolahan nikel pertama didirikan di ibu kota New Caledonia, yaitu kota Noumea pada 1877 (Fisher, 2013). Selanjutnya, pada 1880, pabrik nikel Société le Nickel (SLN) didirikan, dari hasil pengelolaannya telah menunjang perekonomian Prancis selama abad ke-20 (Fisher, 2013).

Eksistensi suku Kanak diperkuat oleh argumen politisnya, karena mereka lahir dan berkembang di New Caledonia. Suku Kanak diyakini berasal dari suku Lapita, yang dikenal sebagai kelompok manusia pertama di Oseania sekitar 1600 SM (Central Intelligence Agency, 2024). Para arkeolog menganggap suku Lapita sebagai nenek moyang etnis Melanesia, berdasarkan temuan artefak tembikar khas yang tersebar di Oseania, termasuk mencakup wilayah New Caledonia, tempat suku Kanak tinggal (Central Intelligence Agency, 2024). Sebelum kedatangan Prancis, suku Kanak hidup dalam struktur sosial terfragmentasi, tersebar dalam sekitar 300 klan dengan 30 bahasa dan dialek (Alber, 2024, p. 281).

Kolonialisasi Prancis membawa sumber konflik, ada tiga perubahan historis yang mendorong suku Kanak untuk menuntut kemerdekaannya (Chappell, 2014, p. 2). Pertama, dari tahun 1959 hingga 1969, saat itu Prancis secara sepikah menarik kembali kekuasaan pemerintahan sendiri yang sebelumnya pernah diberikan ke New Caledonia. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan kendali atas industri penambangan nikel yang dianggap sebagai sumber daya strategis (Chappell, 2014).

Kedua, Prancis melanggar Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 yang bertujuan mempercepat proses dekolonialisasi di wilayah kolonial, namun justru mendorong gelombang migrasi besar-besaran selama penambangan nikel. Kebijakan ini secara langsung meminggirkan suku Kanak secara politik dan demografis. Suku Kanak khawatir akan menjadi minoritas di tanah kelahirannya sendiri, sementara itu mereka merasa bahwa identitasnya berada dalam ancaman kepunahan (Chappell, 2014). Prancis menarik migrasi lebih dari separuh populasi dari wilayah Polinesia, Wallis dan Futuna, serta pendatang dari Eropa dan Asia. Keadaan inilah yang membuat suku Kanak merasa termarjinalkan (Chappell, 2014; Connell, 2021).

Ketiga, para pemuda Kanak yang menempuh pendidikan di universitas-universitas Prancis di Eropa yang terlibat pemberontakan mahasiswa dengan pekerja pada 1968 (Chappell, 2014). Pengalaman ini memengaruhi mereka secara intelektual dan politis sehingga memperkuat kesadaran akan pentingnya persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan New Caledonia. Ketika mereka

kembali ke New Caledonia, semangat perjuangan tersebut menjadi pendorong benih-benih *the kanak awakening* yang terus bergulir pada generasi-generasi berikutnya (Chappell, 2014).

The kanak awakening terus berkembang ke generasi-generasi berikutnya. Pada dekade 1980-an suku Kanak dianggap mulai melancarkan perjuangan “secara serius” untuk menuntut kemerdekaan (Chappell, 2014). Klimaks ini tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman internal mereka, selain itu ada faktor eksternal yang juga mendorong mereka, yaitu karena melihat tetangga-tetangganya di Oseasia yang telah banyak merdeka pada rentang waktu antara tahun 1970-1980. Khususnya ketika melihat wilayah dekolonisasi Prancis di Oseania, yaitu Vanuatu yang merdeka pada 1980 (Wallis, 2015; Trépied, 2012).

Langkah suku Kanak untuk merdeka diredam oleh Perjanjian Matignon pada 1988, untuk mengakhiri pemberontakan yang terjadi saat itu, melalui perjanjian ini, suku Kanak diberikan jaminan ekonomi dan pembangunan selama 10 tahun kedepan, dan diberikan harapan untuk merdeka nantinya (Fisher, 2013). Pada dekade setelahnya kesepakatan politik kembali dicapai, Perjanjian Noumea 1998 melanjutkan jaminan yang sama selama 20 tahun kedepan, dan mereka juga diberikan kesempatan secara eksplisit untuk dapat merdeka melalui referendum saat berakhirnya masa jaminan yang diberikan selama 20 tahun (Fisher, 2013).

Referendum yang memberikan kesempatan bagi suku Kanak untuk dapat merdeka tidak berhasil membuat New Caledonia merdeka. Padahal, referendum sudah dilakukan sebanyak tiga kali pada 2018, 2020, dan 2021, tetapi selalu menunjukkan hasil negatif (suara dimenangkan untuk tetap tergabung bersama Prancis), dan selalu mengalahkan suara untuk yang memilih merdeka (Guardian, 2023).

Penelitian ini mengidentifikasi “kesenjangan” terkait referendum New Caledonia, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk mewujudkan aspirasi kemerdekaan suku Kanak. Meskipun referendum telah dilaksanakan tiga kali pada 2018, 2020, dan 2021, hasilnya tetap gagal mencapai kemerdekaan. Ketidaksesuaian antara idealita dan realita ini menjadi fokus utama penelitian, yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan perjuangan suku Kanak dalam memperoleh kemerdekaan dari Prancis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam (Sugiyono, 2013). Pendekatan induktif digunakan, di mana penelitian tidak diawali dengan hipotesis

atau teori yang harus diuji, melainkan membiarkan pola muncul dari data yang dikumpulkan (Creswell, 2013). Proses analisis berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data, bukan setelahnya (Creswell, 2013; Dey, 1993). Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Referendum sebagai Strategi Prancis dalam Menghambat Kemerdekaan

Menurut Aleksandar Pavkovic dan Peter Radan (2007), mereka berargumen bahwa referendum adalah alat yang digunakan untuk mendirikan sebuah negara baru untuk merdeka. Referendum adalah mekanisme melalui pemungutan suara secara langsung untuk pemisahan diri, kemudian didefinisikan sebagai proses “penarikan sebuah wilayah beserta populasinya” yang sudah ada untuk membentuk negara yang baru (Pavkovic & Radan, 2007).

Dalam konteks New Caledonia, referendum pemisahan diri dapat dikatakan menjadi langkah bagi suku Kanak untuk menuju kemerdekaan karena kolonialisasi Prancis. Lalu hak suku Kanak juga berdasar pada hukum internasional, sebagaimana status New Caledonia yang masuk ke dalam daftar NSGT.

Dapat diartikan bahwa suku Kanak adalah masyarakat yang belum mengurus pemerintahan sendiri, dasarnya adalah Bab XI Pasal 73-74 Piagam PBB. Hal tersebut menegaskan bahwa suku Kanak mempunyai dasar hukum yang jelas dan diakui secara internasional yang memberi legitimasi bagi perjuangan mereka.

Menurut Rivera (2020), pemisahan diri dalam konteks referendum berdasar pada “dasar moral” untuk merdeka atas penjajahan, kemudian pemisahan diri berakar pada keadilan, dan *self-determination* oleh penduduk yang terjajah (Rivera, 2020). Pemisahan diri juga menyimpan suatu strategi didalamnya yang dapat bervariasi, dan tergantung pada konteksnya. Rivera (2020), juga berargumen bahwa negara-negara maju cenderung menggunakan “strategi politik” untuk meningkatkan persepsi positif terhadap para pendukung pemisahan diri (Rivera, 2020).

Pemerintah Prancis, melalui program implementasi Perjanjian Noumea, menerapkan strategi integrasi yang dikenal dengan program *rebalancing*. Program ini dapat dipandang untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan yang mayoritas dihuni oleh suku Kanak seperti di Provinsi Utara dan Kepulauan Loyalty, dengan wilayah perkotaan seperti Noumea yang didominasi oleh warga pendatang (Blaise, 2017). Program ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan raya, satnitas, layanan kesehatan, dan

pendidikan. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah yang mayoritasnya dihuni oleh suku Kanak (Blaise, 2017).

Program *rebalancing* ini menghasilkan peningkatan yang signifikan, seperti angka harapan hidup yang meningkat akibat penurunan angka kematian bayi di Provinsi Utara, dari 22,7 kematian per 1,000 kelahiran pada tahun 1981 menjadi rata-rata 7,1 pada tahun 2007 berkat jangkauan sosial dan bantuan medis gratis di tempat mayoritas suku Kanak tinggal (Blaise, 2017, p. 208). Selain itu, selama periode 1990–2016, lebih dari €1,7 miliar dialokasikan oleh Prancis untuk pembangunan, dengan rata-rata €65 juta per tahun (Blaise, 2017, p. 206).

Kebijakan tersebut, di satu sisi bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif menjelang referendum dan meningkatkan persepsi positif suku Kanak terhadap Prancis. Namun, di sisi lain, langkah tersebut memunculkan kecurigaan dari suku Kanak yang melihatnya sebagai strategi untuk mempertahankan kendali kolonial melalui integrasi politik dan administratif dalam kerangka Perjanjian Noumea.

Meskipun secara formal kebijakan tersebut sejalan dengan Bab XI Piagam PBB tentang wilayah NSGT, alih-alih kebijakan tersebut digunakan sebagai alat politik untuk menciptakan ketergantungan suku Kanak di terhadap Prancis. Kebijakan stabilitas ekonomi dan pembangunan yang digadang-gadang sebagai bentuk dukungan bagi suku Kanak tampak lebih diarahkan untuk menghambat aspirasi kemerdekaan mereka. Dengan demikian, strategi ini bukan hanya menciptakan stabilitas politik menjelang referendum, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Prancis di New Caledonia. Pendekatan modern yang Prancis lakukan terhadap dekolonialisasi lebih bertujuan untuk “mempertahankan status quo dan menghindari disintegrasi New Caledonia.” Strategi ini menunjukkan bagaimana referendum sebagai alat yang demokratis tetapi dapat digunakan untuk mempertahankan kendali kolonial secara terselubung, dan menempatkan kepentingan negara kolonial di atas hak penentuan nasib yang seharusnya menjadi hak untuk komunitas yang terjajah.

Realitas ini semakin kompleks ketika melihat dinamika internal suku Kanak sendiri. Tidak semua anggota suku Kanak mendukung penuh aspirasi kemerdekaan. Berdasarkan data, setidaknya 20% dari populasi Kanak lebih memilih untuk tetap tergabung dengan Prancis, sementara 80% lainnya mendukung kemerdekaan. Namun, meskipun mayoritas mendukung kemerdekaan, jumlah populasi suku Kanak secara keseluruhan hanya mencakup sekitar 41% dari total populasi New Caledonia. Hal ini membuat preferensi mereka sulit untuk memenangkan referendum dan mengubah status quo, terlebih lagi

suku kanak juga harus bersaing dengan suara pendatang yang mempunyai hak dan memiliki pengaruh signifikan pada referendum (Demmer, 2024, p. 104).

2. Integrasi New Caledonia

1. Integrasi pada proses Dekolonisasi

Menurut Jansen dan Osterhammel (2017), wilayah kolonial sering menjadi pendorong utama bagi negara kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya. Wilayah koloni dianggap sebagai “aset strategis” yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan kendali atas wilayah yang dikuasainya. Selain itu, kebijakan integrasi kolonial seringkali dapat menunda proses dekolonisasi. Upaya untuk mengintegrasikan wilayah jajahan secara politik dan administratif ke dalam struktur negara kolonial dimaksudkan untuk memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kolonial (Jansen & Osterhammel, 2017).

Jansen dan Osterhammel juga berpendapat bahwa selama abad ke-20 dekolonisasi menjadi mekanisme penting untuk menghasilkan negara-negara baru untuk merdeka, karena menjadi suatu keharusan dari norma hukum internasional. Seperti, Resolusi Majelis Umum PBB 1514 tahun 1960 yang menegaskan prinsip *self-determination*. Prinsip ini mendorong wilayah kolonial untuk melepaskan diri dari koloninya untuk menuju kemerdekaan (Jansen & Osterhammel, 2017).

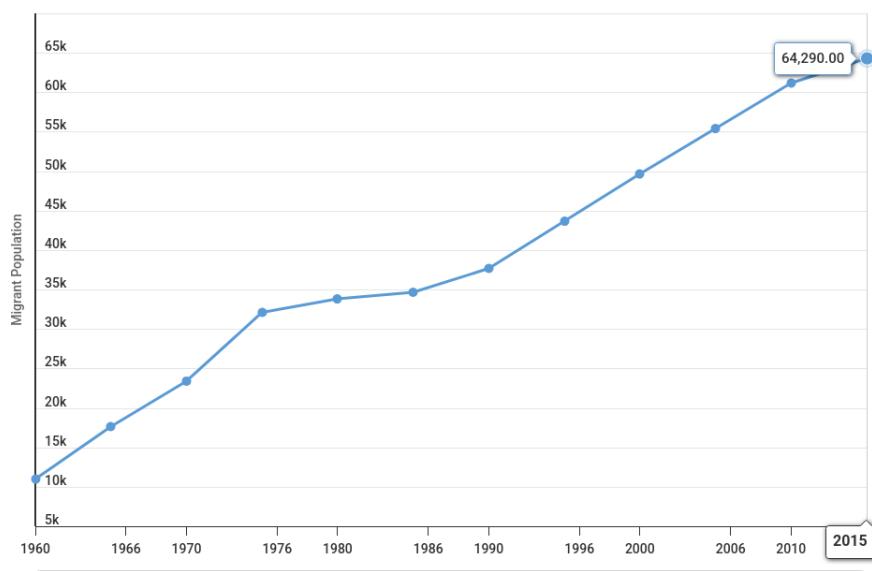
New Caledonia, yang termasuk ke dalam daftar NSGT menjadi suatu tanggung jawab bagi Prancis sebagai *administering state* untuk mencapai pemerintahan mandiri (United Nations, 2006). Dengan kata lain, Pasal 74 Bab XI Piagam PBB mewajibkan Prancis untuk membawa New Caledonia menuju pemerintahan mandiri. Prancis sebagai *administering state* dari New Caledonia dapat mencapai pemerintahan mandiri yang dapat diperoleh melalui tiga cara yang berdasar pada Resolusi Majelis Umum PBB 1541 (XV) tahun 1960, yaitu dengan menjadi (1) asosiasi bebas; (2) integrasi dengan negara lain; (3) memperoleh kemerdekaan (UN General Assembly, 1961).

Penelitian ini menyoroti bahwa Prancis tetap mempertahankan kontrolnya atas New Caledonia melalui kebijakan-kebijakan Perjanjian Noumea yang memberikan hak otonomi khusus dan janji referendum pada masa mendatang. Namun, pada dasarnya hal tersebut hanya menjadi mekanisme untuk menunda disintegrasi New Caledonia sebagai wilayah koloni Prancis.

Akan tetapi, Resolusi Majelis Umum PBB 1541 (XV) tahun 1960 juga mengakui integrasi dengan negara lain sebagai opsi yang sah untuk mencapai pemerintahan mandiri sebagaimana interpretasi dari Bab XI Piagam PBB. Dengan

kata lain, New Caledonia dapat dikatakan sah untuk terintegrasi ke dalam Republik Prancis karena ketentuan yang ada memang memperbolehkannya.

Kegagalan referendum pada 2018, 2020, dan 2021 dapat dilihat sebagai hasil dari strategi kolonial Prancis yang juga telah mengubah demografi New Caledonia karena gelombang migrasi. Tren jumlah migrasi ke New Caledonia memang selalu meningkat, adapun data migrasi dari 1960-2015;



Gambar 1. *New Caledonia Immigration Statistics from 1960-2025*

Data migrasi dari tahun 1960-1980 mencatat rata-rata 1,150 orang yang datang pertahunnya, terutama migrasi untuk penambangan nikel pada dekade 1970-an (Macrotrends, n.d.). Lalu, migrasi pada saat penambangan nikel dapat dikatakan signifikan telah menyumbang hasil suara pada referendum tahun 2018, 2020, dan 2021. Dapat dipahami bahwa Perjanjian Noumea yang mensyaratkan warga pendatang bisa memilih pada referendum minimal mereka sudah tinggal selama 20 tahun (Maclellan, 2019). Dalam hal ini, maka warga pendatang yang sudah menetap di New Caledonia sebelum penandatanganan Perjanjian Noumea pada 1998 diperbolehkan untuk memilih pada referendum minimal sudah tinggal sejak 1978. Data tersebut membuktikan bahwa peningkatan tajam selama migrasi antara 1970-1976 sangat signifikan dalam menyumbang suara pada referendum yang menggagalkan kemerdekaan suku Kanak di masa tibanya referendum.

2. Integrasi melalui Referendum

Perjanjian Noumea 1998 mendefinisikan ulang konsep kewarganegaraan berdasarkan *“common destiny”*. Definisi ini memberikan hak pilih termasuk kepada penduduk pendatang dalam referendum (Korson, 2017).

Seharusnya, hak ini hanya diberikan kepada suku Kanak secara khusus. Dengan demikian, maka memberikan dampak signifikan pada penyelenggaraan referendum setelah 20 tahun kemudian sejak penandatanganan Perjanjian Noumea 1998. Padahal, adanya Perjanjian Noumea merupakan hasil dari perjuangan panjang suku Kanak yang telah lama menjadi koloni Prancis yang memberi hak mereka agar memilih kemerdekaannya melalui referendum.

Kritik terhadap konsep *common destiny* yang didefinisikan Perjanjian Noumea menunjukkan bahwa pemberian hak pilih kepada warga pendatang non-Kanak dianggap bertentangan dengan hak moral suku Kanak sebagai korban kolonialisme. Hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam mekanisme penentuan nasib yang seharusnya menjadi hak utama suku Kanak.

Berdasarkan data dari sensus penduduk yang dirilis oleh pemerintah Prancis dan pemerintah lokal New Caledonia jumlah persentase suku Kanak secara demografi sudah tidak berimbang dari komposisinya. Adapun pembagian persentase berdasarkan etnis pada sensus tahun 2009, 2014, dan 2019;

Etnis	2009	%	2014	%	2019	%
Kanak	99,078	40,3	104,958	39,1	111,856	41,2
Eropa	71,721	29,2	73,199	27,2	65,488	24,1
Multi	20,398	8,3	23,007	8,6	30,758	11,3
Komunitas						
Wallis dan	21,267	8,7	21,926	8,2	22,520	8,3
Futuna						
Komunitas	18,077	7,4	19,146	7,1	20,486	7,5
lainnya						
Tidak	15,044	6,1	26,531	9,9	20,299	7,5
dinyatakan						
Total	245,580	100,0	268,767	100,0	271,407	100,0

Tabel 1. *La croissance démographique fléchit nettement Nouvelle-Calédonie entre 2014 et 2019*

Dalam persentase tersebut jumlah suku Kanak sudah kalah dibandingkan penduduk pendatang secara demografis. Jumlah mereka hanya 40,3% pada 2009, 39,1% pada 2014, dan 41,2% pada 2019 (Rivoilan, 2020). Saat transisi lima tahun

menuju referendum tahun 2018 margin populasi mereka 59,7% dari warga pendatang, sementara saat satu tahun menuju referendum kedua tahun 2020 margin populasi mereka 59,7% dari populasi warga pendatang 58,8%. Sumber-sumber lain menyebutkan jumlah suku Kanak sekitar 41%, dari margin jumlah pendatang yang sekitar 59% (Demmer, 2024, p. 221).

Pada referendum 2018, jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 174,995 orang, termasuk warga pendatang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80,120 pemilih berasal dari suku Kanak, yang hanya mencakup 46% dari total pemilih secara keseluruhan, sedangkan warga pendatang mencapai 54% (Connell, 2019).

Pada referendum 2020, meskipun suara untuk kemerdekaan naik 3%, tetapi jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan 71,533 orang atau 46,74% yang memilih kemerdekaan, dan 81,503 orang atau 53,26% yang memilih tetap bersama Prancis (Nouvelle-Calédonie, 2020). Margin yang naik ini memang memberikan optimisme bagi suku Kanak untuk merdeka pada referendum yang seharusnya dilaksanakan pada 2022 sesuai ketetapan Perjanjian Noumea (Connell, 2021).

Pada referendum 2021 dari margin yang naik 3% dari referendum kedua tahun 2020, pada akhirnya tetap gagal membuat suku Kanak merdeka. Hal tersebut karena praktik referendum tahun 2021 yang tidak dapat dibenarkan yang menghasilkan margin suara kemerdekaan sebesar 93,00% dan membuat New Caledonia gagal merdeka (Nouvelle-Calédonie, 2021). Seharusnya, referendum dilaksanakan pada 2022 sesuai ketetapan Perjanjian Noumea, dan harus mendapatkan persetujuan dari 3/5 kongres New Caledonia untuk dapat menggelar referendum terakhir (Maclellan, 2015).

Alasan dibalik keputusan penyelenggaraan referendum pada 2021 karena pemerintah Prancis ingin menyelesaikan referendum sebelum pemilihan presiden dan parlemen Prancis pada 2022 (Kowasch et all. 2022). Padahal, saat-saat referendum tahun 2021 lonjakan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) banyak memapar mayoritas suku Kanak di angka 200 kematian dari 300 kematian secara keseluruhan. Mereka juga memboikot referendum karena pemerintah Prancis yang secara sepihak mengadakan referendum saat itu (Kowasch et all. 2022).

Syarat yang ditetapkan untuk memilih pada referendum juga sangat longgar bagi warga pendatang. Perjanjian Noumea mensyaratkan pemilih hanya untuk seseorang yang sudah terdaftar dalam pemilih khusus referendum yang diatur dalam Perjanjian Noumea, lahir di New Caledonia dengan orangtua yang sudah tinggal minimal 20 tahun bagi warga pendatang, terdaftar di daftar pemilih khusus untuk pemilihan umum (pemilu) lokal New Caledonia, dan untuk semua warga pendatang yang tinggal di New Caledonia setidaknya selama 20 tahun (Maclellan,

2019, pp. 234-235). Dapat dipahami bahwa syarat pemilih yang ditetapkan hanya untuk seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan New Caledonia dari migrasi sebelum Perjanjian Noumea 1998.

Kebijakan France Constitutional Council pada 2015 juga menambah peluang suku Kanak untuk gagal memenangkan referendum. Akibat dari kebijakan ini memberikan hak pilih kepada pendatang dengan masa tinggal minimal tiga tahun sebagai imbalan politik dari suku Kanak yang banyak tidak terdaftar di pemilihan umum Prancis sebagai syarat untuk memilih pada referendum (Chauchat, 2019).

Berdasarkan data migrasi sebelumnya, setelah Perjanjian Noumea 1998, dari tahun 2000-2015 migrasi kembali meningkat dengan rata-rata 1,019 warga pendatang yang masuk pertahunnya, berbeda dengan dua dekade pada 1980-2000 atau pada saat era Perjanjian Matignon dan Perjanjian Noumea dengan tren yang turun diangka rata-rata 800 pendatang yang masuk pertahunnya (Macrotrends, n.d.). Dengan diizinkannya warga pendatang dengan masa tinggal minimal tiga tahun, maka memperkecil proporsi suara suku Kanak untuk memenangkan referendum karena tren migrasi yang kembali meningkat setelah Perjanjian Noumea.

Pada analisis ini, seharusnya referendum menjadi “penentuan nasib suku Kanak”, karena “secara moral suku Kanak adalah korban kolonialisme.” Namun, suku Kanak kalah dengan strategi politik yang disusun Prancis dari masa kolonial sampai tibanya referendum pada 2018, 2020, dan 2021 yang membuat mereka gagal merdeka.

Menurut Qvortrup (2014), referendum sering kali dipengaruhi oleh desain politik dan bias struktural yang secara khusus dirancang untuk memperkuat status quo pada wilayah yang dikuasai pemerintahan kolonial. Dalam kasus New Caledonia, bias ini tercermin dalam pengaturan daftar pemilih yang secara khusus memberikan preferensi kepada warga pendatang yang secara demografis lebih dominan dan cenderung memilih untuk mempertahankan status quo.

Ketergantungan ekonomi New Caledonia pada Prancis memperkuat bias ini, menciptakan persepsi bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat dijamin melalui hubungan yang terus berlanjut dengan Prancis. Dalam kondisi ini, partai-partai anti-kemerdekaan berhasil membangun narasi bahwa kemerdekaan akan membawa ketidakpastian dan risiko ekonomi yang besar. Narasi ini didukung dengan klaim bahwa hasil referendum pertama tahun 2018 merupakan cerminan kehendak rakyat untuk mempertahankan status quo, meskipun Perjanjian Noumea jelas memberikan dua referendum tambahan (Connell, 2019).

Strategi kampanye dari partai-partai anti-kemerdekaan lebih lanjut menggaungkan masa depan New Caledonia yang akan menjadi negara kecil jika merdeka. Mereka menekankan bahwa tanpa dukungan Prancis, New Caledonia akan menjadi negara kecil yang rentan secara ekonomi dan politik (Connell, 2021).

Analisis ini menyoroti bagaimana referendum di New Caledonia tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang netral dalam hal *self-determination*. Sebaliknya, mekanisme digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kendali kolonial secara terselubung. Dengan mendesain referendum untuk mendukung status quo karena Prancis berhasil memanipulasi proses politik sehingga memperkuat posisinya di New Caledonia. Ketergantungan ekonomi, bias demografi, dan strategi kampanye yang terpolarisasi menjadi faktor utama yang membentuk preferensi pemilih dan pada akhirnya memengaruhi hasil referendum.

Ketidakseimbangan ini semakin terlihat jelas dalam tiga referendum New Caledonia pada 2018, 2020, dan 2021. Komposisi pemilih yang tidak proporsional antara suku Kanak dan penduduk pendatang menjadi penghalang utama bagi suku Kanak untuk mencapai kemerdekaan. Mekanisme referendum, yang dirancang berdasarkan konsep *common destiny* oleh Perjanjian Noumea telah memasukkan seluruh warga pendatang New Caledonia sebagai subjek yang berhak menentukan nasib kemerdekaan wilayah tersebut. Akibatnya, populasi pendatang, yang terus meningkat sejak masa kolonial, "menyalip" populasi suku Kanak yang menggagalkan suara kemerdekaan pada hasil referendum. Dengan demikian, maka suku Kanak "terintegrasi" ke dalam Republik Prancis melalui tiga referendum berturut-turut pada 2018, 2020, dan 2021, yang gagal mewujudkan cita-cita mereka untuk berdiri sebagai entitas negara yang merdeka.

KESIMPULAN

Referendum ketiga tahun 2021 yang menunjukkan hasil negatif menandai akhir seluruh perjuangan suku Kanak untuk merdeka. Hal ini sebagaimana ketetapan Perjanjian Noumea yang memberikan kesempatan tiga kali untuk referendum. Dengan kata lain, suku Kanak sebagai peduduk asli New Caledonia sudah secara sah terintegrasi ke dalam Republik Prancis sebagai hal yang *final*. Penelitian ini menemukan jawaban bahwa referendum tahun 2018, 2020, dan 2021 disebabkan oleh kombinasi strategi politik, ketidakseimbangan demografi, serta sistem pemilih yang tidak menguntungkan suku Kanak. Prancis juga berhasil mempertahankan kontrol atas New Caledonia dengan menerapkan kebijakan integrasi imperial yang terkonsolidasi melalui Perjanjian Noumea selama masa

dekolonisasi. Kebijakan ini memberikan jaminan pembangunan, ekonomi, dan otonomi khusus yang di satu sisi menciptakan stabilitas politik, tetapi di sisi lain menunda proses disintegrasi New Caledonia dari Prancis untuk merdeka. Perubahan demografi menjadi faktor penting dalam kegagalan ini. Migrasi besar selama masa kolonial telah mengubah komposisi populasi suku Kanak sampai tibanya masa referendum, sehingga mereka kian menjadi minoritas di tanah kelahirannya sendiri. Kondisi ini diperburuk oleh sistem pemilih yang melonggarkan persyaratan hak suara, seperti masa tinggal minimal tiga tahun yang baru diadopsi satu tahun sebelum referendum akibat imbalan politik yang menghambat mekanisme referendum untuk suku Kanak. Walaupun referendum menjadi mekanisme demokratis untuk menentukan aspirasi kemerdekaan, tetapi dapat digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan dekolonisasi dalam bentuk modern yang justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan kolonial. Dalam kasus New Caledonia, referendum telah menjadi sarana untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam kekuasaan Prancis, dan mengorbankan hak penentuan nasib suku Kanak yang seharusnya menjadi fokus utama dalam konteks dekolonisasi di wilayah NSGT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burhanuddin. 2015. "Dinamika Negara-Negara Teritori Asing Di Kawasan Pasifik Barat Daya." *Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasabuddin*.

Chappell. 2014. *The Kanak Aweing The Rise of Nationalism in New Caledonia*. Hawaii: University of Hawai'i Press.

Creswell. 2013. "Designing a Qualitative Study." Bab 3 dalam *Qualitative Inquiry & Reaserch Design Choosing Among Five Approaches*, oleh John W. Creswell, 44-45. SAGE Publications.

Fisher. 2013. "France in the South Pasific." *Australian National University*.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta Bandung.

Artikel Jurnal

Alber. 2024. "New Caledonia a Promising Attempt to Constitutionalize a Sovereignty Conflict Going Wrong." *Perspectives on Federalism* 16 (1).

Halaman Web

BBC. t.thn. *New Caledonia profile*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16740838>.

Central Intelligence Agency, CIA. 2024. *New Caledonia*. 7 August.

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/new-caledonia/#introduction>.

Gouvernement De La Nouvelle-Calédonie, Gouvernement De La. 1998. "Un peu d'histoire." *Gouvernement De La Nouvelle-Calédonie*. 5 May.

[https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/\(web-All\)/F4A21F20271E38744B257918007BC9B2/\\$File/Accord-de-noumea_preambule_du_05-05-1998_ChG.pdf?OpenElement](https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdtextes.nsf/(web-All)/F4A21F20271E38744B257918007BC9B2/$File/Accord-de-noumea_preambule_du_05-05-1998_ChG.pdf?OpenElement).

Guardian. 2023. *Macron in New Caledonia: why is the territory divided and will it break away from France?* 24 July.

<https://www.theguardian.com/world/2023/jul/24/emmanuel-macron-new-caledonia-trip-will-it-break-away-independence-referendum>.

United Nations, United. t.thn. *The United Nations and Decolonization*. Diakses October 10, 2024. <https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsht>.